



Dari Opinion Leader kepada **Buzzer**

Transformasi Kekuasaan Komunikasi Politik dalam
Era Media Sosial di Indonesia



Dr. Julia Magdalena Wuysang, M.Si
Editor : Ghina Aprilia, S.A.P., M.A.P

**DARI OPINION LEADER KEPADA BUZZER
TRANSFORMASI KEKUASAAN
KOMUNIKASI POLITIK DALAM ERA
MEDIA SOSIAL DI INDONESIA**

Penulis:

Dr. Julia Magdalena Wuysang, M.Si

Editor:

Ghina Aprilia, S.A.P, M.A.P



UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**Dari Opinion Leader kepada Buzzer
Transformasi Kekuasaan Komunikasi Politik
dalam Era Media Sosial di Indonesia**

Dr. Julia Magdalena Wuysang, M,Si

EDITOR :
Ghina Aprilia, S.A.P, M.A.P

TATA LETAK:
Sari

DESAIN SAMPUL:
Adhar

SUMBER:
www.tdjpublisher.com

ISBN:
978-634-279-049-6

CETAKAN PERTAMA:
Januari 2026

UKURAN:
xiv + 177 Hal; 15,5 cm x 23 cm

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.
Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku
ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022
TANGGUH DENARA JAYA PUBLISHER
Jl. Timor Raya No. 130 B, Kota Kupang, NTT
E-mail: tdj.denarapublisher@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas berkat dan rahmat-Nya, buku bertajuk "Dari Opinion Leader kepada Buzzer: Transformasi Kekuasaan Komunikasi Politik dalam Era Media Sosial di Indonesia" ini dapat hadir di hadapan pembaca sekalian.

Lanskap politik Indonesia telah mengalami pergeseran tektonik sejak fajar digital menyingsing. Jika dahulu kita mengenal sosok opinion leader sebagai mercusuar moralitas dan rujukan informasi yang organik di tengah masyarakat, hari ini wajah pengaruh tersebut telah bersalin rupa. Kehadiran media sosial tidak hanya mengubah medium komunikasinya, tetapi juga mengubah esensi dari "siapa yang didengar" dan "bagaimana suara itu dibentuk."

Buku ini lahir dari kegelisahan intelektual terhadap fenomena pergeseran kekuasaan komunikasi tersebut. Kita menyaksikan transisi dari pengaruh yang berbasis pada otoritas kepakaran dan karisma personal, menuju era di mana pengaruh sering kali menjadi komoditas yang dipabrikasi melalui algoritma, anonimitas, dan keberisikan para buzzer.

Penulisan buku ini tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada rekan sejawat, para narasumber, serta keluarga yang senantiasa memberikan dukungan moral yang tak terhingga.

Akhir kata, buku ini bukan sekadar catatan tentang perubahan teknologi, melainkan sebuah refleksi kritis tentang bagaimana kita, sebagai warga negara, mempertahankan kedaulatan berpikir di tengah kepungan narasi yang terorganisir. Semoga karya ini memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu komunikasi politik di Indonesia.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB 1 Pendahuluan: Perubahan Arsitektur Kekuasaan Komunikasi Politik di Indonesia.....	1
1.1. Latar Belakang: Dari Demokratisasi Media ke Politik Platform.....	1
1.2. Pergeseran Aktor: Dari Pemuka Pendapat ke Buzzer Politik	2
1.3. Komunikasi Algoritmik dan Politik Visibilitas	3
1.4. Buzzer sebagai Gejala Struktural, Bukan Deviasi ...	3
1.5. Perumusan Masalah dan Pertanyaan Kunci Buku ...	4
1.6. Kontribusi Teoretik dan Signifikansi Akademik	4
1.7. Struktur Buku.....	5
BAB 2. Perubahan Arsitektur Kekuasaan Komunikasi Politik.....	6
2.1. Latar Belakang Pergeseran Komunikasi Politik di Indonesia Pasca-Reformasi.....	6
2.1.1. Demokratisasi Media dan Liberalitas Informasi	6
2.1.2. Perubahan Relasi Negara, Elite, dan Publik	6
2.1.3. Dampak Era Digital Terhadap Komunikasi Politik	7
2.1.5. Relevansi Kajian	7
2.2. Dari Komunikasi Representatif ke Komunikasi Algoritmik.....	8
2.2.1. Evolusi Komunikasi Politik	8
2.2.2. Algoritma sebagai Mediator Kekuasaan	9
2.2.3. Implikasi Demokratis dan Normatif	9

2.2.4.	Relevansi Kajian Buku.....	10
2.3.	Problematika buzzer sebagai aktor politik baru	10
2.3.1.	Buzzer sebagai Aktor Hibrida	10
2.3.2.	Tantangan Demokratis	11
2.3.3.	Dimensi Etis dan Regulatif	11
2.3.4.	Relevansi Kajian Buku.....	12
2.4.	Tujuan, kontribusi Teoretik, dan Posisi Buku.....	12
2.4.1.	Tujuan Buku	13
2.4.2.	Kontribusi Teoretik	13
2.4.3.	Posisi Buku dalam Literatur	14
2.4.4.	Sintesis	14
BAB 3.	Pemuka Pendapat dalam Tradisi Klasik Komunikasi Politik.....	16
3.1.	Two-step flow dan legitimasi sosial pemuka pendapat	16
3.1.1.	Legitimasi Sosial: Kepercayaan, Kedekatan, dan Otoritas Simbolik	17
3.1.2.	Pemuka Pendapat sebagai Penjaga Rasionalitas Politik Sehari-hari	18
3.1.3.	Relevansi Two-Step Flow dalam Konteks Indonesia Pra-Digital.....	18
3.2.	Modal Simbolik dan Otoritas Moral Pemuka Pendapat	19
3.2.1.	Otoritas Moral sebagai Sumber Daya Politik Non-Formal	20
3.2.2.	Reputasi sebagai Infrastruktur Kepercayaan Politik	20
3.2.3.	Konteks Indonesia: Modal Simbolik dalam Politik Berbasis Komunitas	21
3.3.	Pemuka Pendapat dalam Konteks Politik Indonesia Pra-Digital	22
3.3.1.	Tokoh Agama sebagai Pemuka Pendapat Moral-Politik	22

3.3.2.	Intelektual Publik dan Produksi Wacana Kritis.....	23
3.3.3.	Pers sebagai Institusi Pemuka Pendapat Kolektif	24
3.3.4.	Sintesis: Ekologi Pemuka Pendapat Pra-Digital.....	24
3.4.	Batasan Model Klasik dalam Ekosistem Digital ...	25
3.4.1.	Krisis Linearitas dan Logika Viralitas	25
3.4.2.	Manipulasi Jaringan dan Distorsi Legitimasi.....	26
3.4.3.	Fragmentasi Publik dan Runtuhnya Pemuka Pendapat Tunggal.....	27
3.4.4.	Implikasi Teoretik: Dari Mediasi Sosial ke Infrastruktur Platform	27
BAB 4.	Media Sosial dan Rekonfigurasi Ruang Publik	28
4.1.	Dari Ruang Publik Deliberatif ke Ruang Publik Terfragmentasi	28
4.1.1.	Krisis Kesatuan Ruang Publik dan Erosi Mediasi Institusional	28
4.1.2.	Networked Publics dan Reorganisasi Partisipasi Politik	29
4.1.3.	Rasionalitas Deliberatif vs. Rasionalitas Jaringan	30
4.1.4.	Implikasi Demokratis: Pluralisasi atau Polarisasi?	30
4.2.	Logika algoritma dan ekonomi perhatian Platform memprioritaskan konten emosional dan polarizing (Zuboff, 2019).....	31
4.2.1.	Ekonomi Perhatian dan Reorganisasi Nilai Komunikasi Politik	31
4.2.2.	Algoritma, Emosi, dan Polarisasi Wacana Politik	32